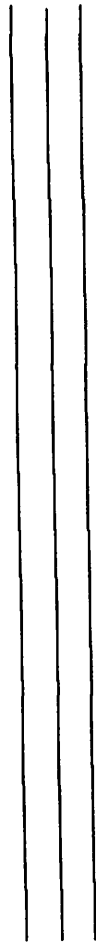


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**BALIKPAPAN, 24 FEBRUARI 2015**

**INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2013, yang merupakan tahun kedua dari lima tahun Rencana Strategik Inspektorat Kota Balikpapan dan Rencana Strategik Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Inspektorat Kota Balikpapan memiliki kewajiban menyusun LAKIP sesuai dengan pasal 13, Bab IV dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama tahun anggaran 2014, Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Pengawas Fungsional telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan pelaksanaan reviu laporan keuangan daerah dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Sekretariat Inspektorat yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga



LAKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

Balikpapan, 24 Pebruari 2015

**INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN**

**Hj. DAHNIAR, S.E.,M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631111 198511 2 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. ASPEK STRATEGIS
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
  - 1. VISI DAN MISI
  - 2. TUJUAN DAN SASARAN
  - 3. STRATEGI KEBIJAKAN
  - 4. RENCANA KERJA TAHUNAN 2013
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA
- B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. SK. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU);
- 2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014;
- 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014;
- 4. SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan visi mewujudkan Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju (madinatul Iman) untuk periode 2011-2016.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan disampaikan bahwa ruang lingkup objek tugas dan fungsi Inspektorat adalah pengawasan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berperan penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai visi "Mewujudkan Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman", sedangkan misinya adalah "Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial" serta "Melaksanakan reformasi birokrasi".

Dalam pencapaian misi memerlukan kajian perencanaan yang komprehensif dengan memperhitungkan secara kualitatif dan kuantitatif dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat serta faktor pendanaan kegiatan, sarana/prasarana kantor yang memadai dan sumber daya non APIP yang bertugas di bidang kesekretariatan.

Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan yang akan dicapai pada tahun 2012-2016 adalah: 1) Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten; 2) Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan; 3) Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD dan 4) Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat.



Untuk mencapai sasaran tersebut Inspektorat Kota Balikpapan menetapkan 15 Indikator Kinerja Utama : 1) Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional; 2) Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan; 3) Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus; 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; 5) Jumlah Obyek Pengawasan; 6) Persentase pelaporan LP2P; 7) Persentase penyampaian LHKPN; 8) Persentase penandatanganan Pakta Integritas; 9) Persentase pelaporan penerimaan gratifikasi; 10) Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai; 11) Persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah; 12) Persentase pelaksanaan sosialisai pengelolaan aset dan keuangan daerah; 13) Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP; 14) Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi dan 15) Persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jika dilihat dari penggunaan anggaran, pada tahun 2014 realisasi anggaran mencapai sebesar 86,20% dari total anggaran yang diperoleh. Realisasi belanja terbesar digunakan untuk pelatihan pengembangan profesi terkait dengan sistem pengawasan sebesar 97,80%. Secara keseluruhan kegiatan telah terlaksana 100% realisasi keuangan sebesar .. tersebut merupakan silva positif dari adanya penghematan anggaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh sumberdaya yang ada terutama sumberdaya manusia. Beberapa hal yang tidak dapat dicapai dipengaruhi oleh beberapa kendala diantaranya keterlambatan dalam proses administrasi petunjuk teknis kegiatan, namun adapula kegiatan yang terlambat dilaksanakan terkait dengan birokrasi dan koordinasi. Disamping itu, terdapat juga permasalahan penyediaan sumberdaya manusia (SDM).



Pada LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 dapat berhasil dengan baik. Untuk pencapaian sasaran Tahun 2014 dari 4 sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah dapat tercapai dengan baik, walaupun terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat tercapai sesuai targetnya, ketidakberhasilan pencapaian indikator sasaran sangat tergantung dari tingkat peran aktif SKPD yang terkait dalam menyikapi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan motivasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh aparat Inspektorat Kota Balikpapan untuk dapat meningkatkan capaian kinerjanya di masa mendatang. Selain itu dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan serta instansi terkait juga sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Inspektorat Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Kepemerintahan yang Baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi serta program Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2014.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan good government, transparansi dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.

#### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Inspektorat Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi berpedoman pada beberapa peraturan antara lain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 tanggal 27 Oktober tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dimana Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur pengawas





penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi Inspektur Kota Balikpapan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014, yaitu :

- A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah kabupaten/kota meliputi :
1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
  2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
  3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
  4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
  5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
  6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
  8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten/kota :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
    - a. PMPRB online;



- b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
  - c. Pembangunan zona integritas.
- 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
  - 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
  - 4. Pemantauan penerimaan CPNS;
  - 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- C. Kegiatan penunjang pengawasan
- 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  - 2. Rapat koodinasi;
  - 3. Tugas lain sesuai perintah Bupati/Walikota.

### **C. ASPEK STRATEGIS**

Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian. Sejalan dengan peranan Inspektorat Kota Balikpapan yang merupakan unsur pengawasan yang mempunyai tugas membantu Walikota dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota Balikpapan, Inspektorat juga berperan penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. maka konsekuensi logis dari penjelasan diatas diperkirakan menyangkut hal-hal sebagai berikut:



1. Potensi objek tugas pengawasan reguler Inspektorat secara kuantitatif berbanding lurus dengan banyaknya SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang ada di Inspektorat Kota Balikpapan dituntut memiliki pengetahuan/wawasan yang memadai dari masing-masing urusan tersebut agar peran *quality assurance* dapat terlaksana secara maksimal;
3. Inspektorat Kota Balikpapan mempunyai peran sentral dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
4. Mengingat Inspektorat Kota Balikpapan sebagai institusi pengawasan internal pemerintah, pemberdayaan peran APIP dapat dimaksimalkan, sehingga mampu mendeteksi secara dini bilamana terjadi penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dan APIP mampu mengawal jalannya roda pemerintahan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Inspektorat Kota Balikpapan sebagai pendorong terlaksananya Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Balikpapan melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
6. Hasil evaluasi internal pelayanan publik, Pemerintah Kota Balikpapan masih mendapat posisi ke 15 dari 56 kabupaten/kota yang sudah disurvei oleh KPK, karena itu sesuai dengan misi ke 3 Inspektorat Kota Balikpapan mendorong terlaksananya percepatan pelayanan publik dengan melakukan evaluasi terhadap SKPD yang terkait pelayanan publik.



#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Inspektorat Kota Balikpapan terlihat pada bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan pada Tabel I.

Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2014 memiliki sumber daya manusia sejumlah 55 orang Pegawai yang terdiri dari : 50 orang PNS dan 5 orang Non PNS yang diperbantukan pada bidang sekretariat. Jumlah PNS berdasarkan tugas dan fungsi pada tabel berikut.

Tabel 1

Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2014 berdasarkan Struktural dan Jabatan Fungsional

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	4
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7
5.	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	4
6.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	
	a. Pejabat Fungsional Auditor	24
	b. Pejabat P2UPD	5
	Jumlah	55

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

1. Aktiva tanah dan Bangunan Gedung Kantor
2. Kendaraan dinas roda empat sebanyak 12 buah
3. Kendaraan dinas roda dua sebanyak 16 buah



4. Inventaris dan fasilitas/perlengkapan kantor lainnya.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2014 disajikan sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelolaan kinerja program/kegiatan.

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan rencana strategi Inspektorat Kota Balikpapan untuk periode 2012 – 2016, target setiap sasaran strategis jangka menengah, rencana kinerja tahunan tahun 2013, hasil review renstra tahun 2012 – 2016 yang telah dilakukan, serta penetapan kinerja tahun 2014.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pengelolaan kinerja, analisis pencapaian kinerja program.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan saran.



## BAB II.

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENSTRA

##### 1. Visi dan Misi

Dalam penentuan visi, Inspektorat Kota Balikpapan telah mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu: memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran organisasi, dirumuskan secara singkat padat mudah diingat, dilaksanakan secara konsisten, serta dapat dicapai. Oleh sebab itu Visi Inspektorat Kota Balikpapan menjadi visi bersama dan mampu mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya Aparatur.

Adapun visi Inspektorat Kota Balikpapan yang diharapkan mampu memberi arah kedepan yaitu : “ Mewujudkan Institusi Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional”. Misi Inspektorat Kota Balikpapan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit organisasi Inspektorat Kota Balikpapan dalam upaya-upaya untuk mewujudkan visi.

Dengan pernyataan misi yang telah ditetapkan diharapkan seluruh unsur Inspektorat Kota Balikpapan dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan Kota Balikpapan.

Misi Inspektorat Kota Balikpapan telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. serta memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan.



Kriteria dalam penentuan misi Inspektorat Kota Balikpapan ini antara lain adalah sejalan dengan upaya pencapaian visi dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan yaitu :

- a. Meningkatkan ketentuan umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial (misi 3);
- b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (tujuan kedua dari misi ke 5)  
Berdasarkan acuan tersebut diatas misi Inspektorat Kota Balikpapan adalah :
  1. Meningkatkan sumber daya aparatur Inspektorat;
  2. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kinerja SKPD;
  3. Mendorong perubahan-perubahan signifikan atas jalannya sistem pelayanan masyarakat dengan mengedepankan faktor efisiensi dan efektifitas.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Inspektorat Kota Balikpapan merupakan implementasi/penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Kota Balikpapan maupun Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Inspektorat Kota Balikpapan telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun karakteristik perumusan tujuan antara



lain waktu pencapaiannya dalam jangka menengah, dilakukan secara jelas, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut diatas, tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten.
- b. Meningkatnya kemampuan aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan.
- c. Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD.
- d. Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat.

### **3. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan inspektorat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun strategi Inspektorat Kota Balikpapan terdiri dari kebijakan operasional, serta program dan kegiatan. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam





rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap aparatur inspektorat kota Balikpapan untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengetahuan aparatur pengawasan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- b. Optimalisasi pengawasan dan evaluasi atas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan SKPD.
- c. Evaluasi dan perbaikan prosedur pelayanan masyarakat.

#### 4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

Rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	2 orang
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 orang
Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan SKPD	Jumlah pemeriksaan khusus/kasus	17 kasus
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	90%
	Jumlah objek pengawasan	160 obyek
	Persentase pelaporan LP2P	80%



	Presentase penyampaian LHKPN	50%
	Presentase penandatanganan Pakta Integritas	50%
	Persentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	90%
	Persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%
	Persentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	100%
Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat	Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP	11%
	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi (kecuali Setdakot, DKK, Disdik)	75%
	Persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	50%

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Renstra Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
I	Meningkatnya Kapasitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	Inspektorat



II	Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang Tugas Pokok Pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	Inspektorat
III.	Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus	Inspektorat
		Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Inspektorat
		Jumlah Objek Pengawasan	Inspektorat
		Prosentase Pelaporan LP2P	Inspektorat
		Prosentase Pelaporan LHKPN	Inspektorat
		Prosentase Penandatanganan Pakta Integritas	Inspektorat
		Prosentase Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	Inspektorat
		Prosentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	Inspektorat
		Prosentase SKPD yang melaksanakan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat
IV	Meningkatnya Kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat	Prosentase SKPD yang melakukan SPIP	Inspektorat
		Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	Inspektorat



		Prosentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat
--	--	--	-------------

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2014 berpedoman pada Permenpan No.29 Tahun 2010. Adapun Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2014 dijelaskan sebagaimana terlampir



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berikut ini disajikan sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2014:

##### 1. Meningkatnya Kapasitas APIP yang profesional dan kompeten

Sasaran kinerja meningkatnya kapasitas APIP yang profesional ditunjukkan adalah merupakan upaya penguatan pengawasan sesuai agenda reformasi birokrasi, dengan meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten dalam menunjang tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah 79 tahun 2005.

Indikator Kinerja utama	2013		2014		Capain 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	10 org	11 org	2 org	2 org	100

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten dengan indikator kinerja Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional, pencapaian target menunjukkan angka 100%. adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 berjumlah 2 orang, realisasi yang tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu berjumlah 2 orang. Jika dibandingkan tahun 2013



jumlah realisasi mencapai 11 orang melebihi dari yang ditargetkan yaitu 10 Orang, hal ini disesuaikan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan fungsional, dengan terpenuhinya jumlah APIP yang telah mengikuti sertifikasi jabatan fungsional dan telah lulus pula dalam mengikuti ujian sertifikasi, menunjukkan bahwa APIP Inspektorat telah memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan tugas dan fungsinya.

## 2. Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan

Aparatur pengawas internal pemerintah memiliki peran layanan sebagai penjamin kualitas dan konsulting tentunya wajib memiliki kemampuan memadai yang dapat melebihi dari SKPD yang dilayan, demikian pula instansi Inspektorat harus dapat menjadi contoh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan daerah, sehingga tidak hanya aparatur pemeriksa yang ikut serta dalam diklat/pelatihan tetapi juga aparatur penyelenggaraan administrasi di sekretariat inspektorat perlu untuk meningkatkan pemahamannya sehingga penyelenggaraan tugas-tugas dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja utama	2013		2014		Capain 2013
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Jumlah aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 org	60 org	60 org	60 org	100

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kemampuan aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan menunjukkan angka 100%, adapun target yang ditetapkan pada awal



tahun 2014 berjumlah 60 orang, realisasi yang tercapai sesuai dengan target yaitu berjumlah 60 orang, hal ini sama dengan tahun lalu.

### 3. Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan SKPD

Sasaran meningkatnya kesadaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan SKPD adalah merupakan penjabaran dari misi ke 2 Inspektorat, sasaran yang dimaksud adalah merupakan dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, semakin efektif tugas dan pembinaan dan pengawasan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan keuangan daerah di SKPD, tujuan ditetapkannya dari sasaran tersebut adalah terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga opini WTP dapat di capai. Pada tahun 2013 LKPD Kota Balikpapan telah memperoleh Opini WTP dengan paragraf penjelasan dari BPK, hal ini menunjukkan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dapat dicapai di tahun 2013, tentunya dengan upaya yang keras dari Inspektorat diharapkan LKPD tahun 2014 mendapatkan kembali Opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kinerja utama	2013		2014		Capain 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	88%	84%	90%	86%	87
Jumlah obyek pengawasan	160	157	160	247	154,38
Prosentase pelaporan LP2P	75%	81,54%	80%	77%	96
Prosentase penyampaian LHKPN	40%	94,10%	-	-	-
Prosentase penandatanganan pakta integritas	40%	81,30%	-	-	-
Prosentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100
Prosentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	80%	80%	90%	90%	100



Prosentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	35,38%	100%	28%	172
Prosentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100

Hasil capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan SKPD, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja Jumlah pemeriksaan khusus/kasus, pencapaian target menunjukkan angka 105%. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2014 berjumlah 17 kasus, realisasi yang dapat dicapai lebih kecil dari target yang ditetapkan yaitu berjumlah 16 kasus, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pembinaan dan pengawasan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemeriksaan khusus/kasus tidak hanya bertujuan untuk pemeriksaan atas adanya pengaduan masyarakat akan tetapi merupakan pemeriksaan tujuan tertentu dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi apakah pengaduan masyarakat tersebut sebagai akibat dari adanya ketidakpatuhan SKPD dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,

- b. Indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, pencapaian target menunjukkan angka 87%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2014 sebesar 90% sedangkan realisasi yang dapat dicapai hanya sebesar 76,53%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti oleh auditi baik oleh pemeriksa intern (APIP) maupun oleh pemeriksa ekstern dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan. Tindak lanjut hasil pemeriksaaan internal oleh APIP Inspektorat sebanyak 71,55%





dari 384 rekomendasi dan telah dapat dituntaskan sebanyak 244 rekomendasi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 sebanyak 86,30% dari 511 rekomendasi telah dapat dituntaskan sebanyak 441 rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang ditargetkan sebesar 90 % pada dasarnya telah dapat dicapai yakni pada pemuktahiran data di BPK **bulan juli 2014 sebesar 93,36 %** sedangkan pada pemuktahiran data bulan januari 2015 penyelesaian tindak lanjut mencapai 86,30 % hal ini dikarenakan adanya LHP BPK yakni pemeriksaan Inspektorat pengelolaan sarana dan prasarana pada dinas pendidikan yang diserahkan pada bulan Desember 2014 dan masuk dalam pemantauan tindak lanjut rekomendasi tahun 2014 adapun proses penyelesaian sedang berjalan oleh SKPD terkait Penyelesaian tindak lanjut ini adalah yang tertinggi dari 10 kabupate/kota dan provinsi. Hambatan yang terjadi dalam tindak lanjut hasil temuan disebabkan karena proses tindak lanjut tersebut memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak serta menyangkut daerah lain sehingga perlu waktu untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain memaksimalkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dengan berkoordinasi dengan auditi mengenai tindak lanjut temuan dengan melaksanakan rapat koordinasi pengawasan daerah;.

- c. Indikator kinerja Jumlah obyek pengawasan, pencapaian target menunjukkan angka 154,38%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2014 berjumlah 160 obyek, sedangkan realisasi yang dapat dicapai melebihi dari target sebesar 247 obyek yang terdiri dari pemeriksaan reguler berjumlah 98 obyek, pemeriksaan barang/jasa berjumlah 6 obyek, pemeriksaan tujuan tertentu berjumlah 15 obyek, Cash Opname berjumlah 64 obyek, Evaluasi LAKIP berjumlah 30 obyek dan Evaluasi SPGRM pada kelurahan berjumlah 34 obyek. Jika dibandingkan tahun 2013 realisasi jumlah obyek pengawasan



sebesar 157 obyek, terdapat kenaikan sebesar 36%. Bertambahnya jumlah obyek pemeriksaan dari target adalah dalam rangka terwujudnya misi ke 2 yaitu meningkatkan peran APIP dalam pembinaan SKPD untuk menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku, hasil pemeriksaan inspektorat atas penyelenggaraan pemerintahan di SKPD menunjukkan adanya kecenderungan menurun jumlah temuan yang berdampak pada ketidaktaatan pada Perundang-undangan dibandingkan dari hasil pemeriksaan tahun 2013 hal ini merupakan bahwa pembinaan melalui pemeriksaan dan konsulting memberikan efek positif terhadap kehati-hatian dan kecermatan dalam penyelenggaraan keuangan dan administrasi.

- d. Indikator kinerja persentase pelaporan LP2P, pencapaian kinerja menunjukkan angka 96%. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2014 sebesar 80% sedangkan realisasi yang dicapai kurang dari target yang ditetapkan sebesar 77%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah PNS yang melaporkan LP2P. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan PNS yang wajib LP2P berjumlah 4.540 orang. Sedangkan PNS yang melaporkan LP2P berjumlah 3.517 orang. Jika dibandingkan tahun anggaran 2013 realisasi yang dicapai sebesar 81%, terdapat penurunan sebesar 0.05%. Ketaatan dan ketepatan pelaporan LP2P bagi pegawai wajib LP2P merupakan wujud kesadaran hukum pegawai dalam menjalankan ketentuan yang berlaku, menurunnya pelapor LP2P tahun 2014 lebih dikarenakan masih belum meluasnya jangkauan sosialisasi ketaatan pelaporan khususnya pada sekolah-sekolah dilingkungan pemerintah Kota Balikpapan, oleh karenanya pada tahun 2015 inspektorat telah mengalokasikan kegiatan desiminasi LP2P bagi bendahara-bendahara sekolah sehingga diharapkan seluruh PNS



Gol III keatas ( wajib LP2P ) dapat menyampaikan LP2P secara tepat waktu.

- e. Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN, adapun target yang ditetapkan di dalam RENSTRA untuk tahun 2014 sebesar 50%, namun karena pertimbangan/arahan dari Pemerintah Pusat terkait dengan kewenangan pelaksanaan uraian tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2014 penyampaian LHKPN dipusatkan di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sehingga untuk indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN untuk tahun 2014 tidak dapat terealisasi. Hal ini diluar dari kendali dari Pihak manajemen Inspektorat, Namun demikian melalui kegiatan pemeriksaan regular, Inspektorat melakukan pemantauan ketaatan pelaporan LHKPN menjadi hal-hal yang perlu perhatian oleh pimpinan SKPD terhadap penyelenggaraan negara wajib LHKPN.
- f. Indikator kinerja persentase pelaporan penerimaan gratifikasi menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2014 sebesar 100%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, PNS yang telah melaporkan penerimaan gratifikasi ke Inspektorat Kota Balikpapan dan telah ditindak lanjuti dengan meneruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah 3 orang. Sesuai perwali 38 tahun 2013 Inspektorat merupakan unit pengendali gratifikasi yang tugas menghimpun pelaporan gratifikasi dan menyampaikan ke tim pengendali gratifikasi atas ada penerimaan gratifikasi. Pelaporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan menunjukkan tingkat kesadaran aparatur semakin tinggi.
- g. Indikator kinerja persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai, pencapaian target menunjukkan angka 100. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2014 sebesar 100% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Hasil asistensi penyusunan



laporan keuangan SKPD menunjukkan bahwa SAP dan SPI telah memadai, Laporan keuangan SKPD mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2013 mendapat penilaian terbaik dari BPK dengan opini WTP.

- h. Indikator kinerja persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencapaian target menunjukkan angka 172%. Adapun target yang ditetapkan awal tahun sebesar 100% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 28%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan jumlah SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berjumlah 18 SKPD dari 65 SKPD. Konsultasi atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD menunjukkan adanya kesadaran dan kehati-hatian penyelenggaraan pemerintah daerah agar pelaksanaan kegiatan tertib dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- i. Indikator kinerja persentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah, pencapaian target menunjukkan angka 100%. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2014 sebesar 100% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100 %. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan berjumlah 3 kali dari target yang ditetapkan berjumlah 3 kali. Implementasi pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak hanya melalui kegiatan pemeriksaan, akan tetapi selalu mengevaluasi aspek-aspek yang menjadi penyebab temuan, sehingga perlu sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset, hasil



evaluasi menunjukkan pelaporan pengelolaan asset dan persediaan SKPD cenderung meningkat lebih tertib.

#### 4. Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat pada SKPD

Sasaran meningkatnya pelaporan masyarakat pada SKPD merupakan penjabaran dari misi ke 3 Inspektorat yakni mendorong perubahan-perubahan signifikan atas sistem pelayanan masyarakat dengan mengedepankan faktor efisiensi dan ekonomis.

Indikator Kinerja utama	2013		2014		Capain 2013
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Prosentase SKPD yang melaksanakan SPIP	11%	11%	11%	16%	145
Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	50%	54,38%	75%	96%	128
Prosentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25%	34,37%	50%	90%	180

Hasil capaian kinerja dari sasaran meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat pada SKPD dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja persentase SKPD yang melaksanakan SPIP, pencapaian kinerja menunjukkan angka 145%. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2014 sebesar 11% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 16%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah SKPD dilakukan DA SPIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, SPIP yang dilaksanakan oleh SKPD berjumlah 3 SKPD dari 27 SKPD yang mempunyai tupoksi terkait dengan pelayanan publik. Hasil DA telah pada tindak lanjut dengan penilaian resiko ( CSA ) serta telah disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sehingga diharapkan dapat



meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, hasil evaluasi menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik cukup baik, terdapat 4 SKPD mendapat penghargaan zona hijau terkait kepatuhan oleh ombusmand dan 2 SKPD mendapat penilaian terbaik dari ombusmand RI dalam pelayanan publik hal ini merupakan bahwa evaluasi pelayanan public yang dilakukan dan rencana tindak lanjut pengendalian yang telah disusun SKPD telah diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Indikator kinerja persentase LAKIP SKPD yang di evaluasi, pencapaian target menunjukkan angka 128%. Adapun target yang ditetapkan awal tahun 2014 sebesar 75% sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar 96%. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, LAKIP SKPD yang dievaluasi Tahun Anggaran 2014 berjumlah 30 SKPD, selain Kelurahan.
- c. Indikator kinerja persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pencapaian target menunjukkan angka 180%. Adapun target yang ditetapkan awal Tahun Anggaran 2014 sebesar 50%, sedangkan realisasi yang tercapai melebihi target sebesar 90%. Berdasarkan basis data Inspektorat Kota Balikpapan, SKPD yang telah melaksanakan dan menyelesaikan PMPRB berjumlah 32 SKPD dari Jumlah SKPD yang melaksanakan PMPRB berjumlah 32 SKPD.

## **B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas Keuangan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini disajikan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2014 dalam hal pencapaian indikator kinerja per masing-masing sasaran strategis :



Prosentase penyampaian LHKPN	-	-	
Prosentase penandatanganan pakta integritas	-	-	
Prosentase pelaporan penerimaan gratifikasi	27.436.500	19.715.040	100
Prosentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	117.250.000	81.055.056	100
Prosentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	62.400.000	58.050.000	100
Prosentase pelaksanaan sosialisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	42.727.500	35.679.500	100
Prosentase SKPD yang melaksanakan SPIP	65.570.100	51.240.600	100
Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	207.331.500	173.569.340	100
Prosentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	139.775.000	115.800.042	100

Akuntabilitas terhadap realisasi keuangan terkait pencapaian sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 75.49%. Hal ini adalah bentuk efisiensi dalam pencapaian target indikator kinerja.

#### 4. Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat pada SKPD

Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Keuangan (Rp)	Fisik (%)
Prosentase SKPD yang melaksanakan SPIP	65.570.100	51.240.600	100
Prosentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	207.331.500	173.569.340	100
Prosentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	139.775.000	115.800.042	100

Akuntabilitas terhadap realisasi keuangan terkait pencapaian sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 75.49%. Hal ini adalah bentuk efisiensi dalam pencapaian target indikator kinerja.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clean Government yang melibatkan Stakeholder sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, 24 Februari 2015

**INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN**



**Hj. DAHNIAR, S.E., M.AP.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196311111985112003





RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

Unit SKPD : Inspektorat Kota Balikpapan  
 Tahun : 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kapasitas APP yang Profesional dan Kompeten	Jumlah APP yang mengikuti Sertifikasi Jabatan Fungsional	2 Orang
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang Tugas Pokok Pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 Orang
Meningkatnya kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	1. Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus	17 Kasus
	2. Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	90%
	3. Jumlah Objek Pengawasan	160 Obyek Pengawasan
	4. Presentase Pelaporan LP2P	80%
	5. Presentase Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	100%
	6. Presentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	90%
	7. Presentase SKPD yang melaksanakan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
	8. Presentase Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	100%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat oleh SKPD	1. Presentase SKPD yang melakukan DA SPP	11%
	2. Presentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	75%
	3. Presentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	50%

  
 PI INSPEKTOR  
 H. DAHNIAR, S.E., M.AP.  
 NIP. 1931111 198503 2 003



## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 INSPEKTORAT

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAHNIAR**

Jabatan : **PLT. INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**


Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebihantisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

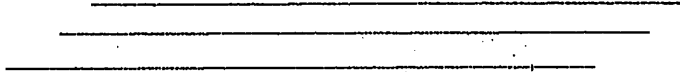
  
Pihak Kedua,  
**H.M. RIZAL EFFENDI**

Balikpapan, 27 Januari 2014

Pihak Pertama,  
  
**DAHNIAR**

**PENETAPAN KINERJA**

**TAHUN ANGGARAN 2014**



**INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

**JANUARI 2014**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014  
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kapasitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	2 Orang	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1. Pelatihan pengembangan profesi terkait dengan sistem pengawasan 2. Pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	Rp 37.380.000,00 Rp 96.796.700,00
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 Org	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1. Mengikuti Pelatihan pengembangan profesi terkait dengan sistem pengawasan 2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Rp 204.071.500,00 Rp 1.784.849.640,00 Rp 47.910.000,00
Meningkatnya Kesadaran Hukum atas Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus	17 Kasus	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1. Pelaksanaan pengawasan khusus/kasus	Rp 61.200.000,00
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	90%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan External dan Internal 2. Rapat Koordinasi Pengawasan daerah dan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Pendampingan pemeriksaan LKPD dan Penyusunan Rencana aksi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK	Rp 394.800.000,00 Rp 88.043.100,00 Rp 48.500.000,00

	Jumlah Objek Pengawasan	160 Obyek Pengawasan	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Pelaksanaan Pengawasana Reguler dan tujuan tertentu dan Kegiatan - Kegiatan SKPD	Rp 1.170.410.000
	Presentase pelaporan LP2P	80%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1. Penelitian dan Penilaian LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan 2. Desiminasi LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp 110.337.400,00 Rp 79.698.200,00
	Presentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp 27.436.500,00
	Presentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI yang memadai	90%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan TA 2013	Rp 117.250.000,00
	Presentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Unit Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (ULKPD)	Rp 62.400.000,00
	Presentase Pelaksanaan Sosialisai Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	100%	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN ADMINITRASI ASET PEMERINTAHAN DAERAH 1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Manajemen Aset daerah	Rp 42.727.500,00

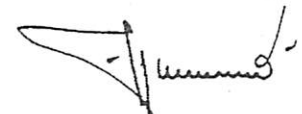
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Masyarakat pada SKPD	Presentase SKPD Yang Melaksanakan SPIP	11%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Sosialisasi Control Self Assessment (CSA) dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) dan Diagnostic Assessment (DA)	Rp	65.570.100,00
	Presentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	75%	PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN 1 Evaluasi Kinerja Instansi Atas Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp	111.000.000,00
	Presentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	50%	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Bimbingan Teknis Pendamping Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi	Rp Rp	139.775.000,00 207.331.500,00

1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp	204.071.500,00
2. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp	48.500.000,00
3. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Rp	2.114.745.300,00
4. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Rp	1.966.936.340,00
5. PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN	Rp	111.000.000,00
6. PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI ASET PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	42.727.500,00
7. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	409.506.500,00
<b>JUMLAH</b>	Rp	<b>4.897.487.140,00</b>

Mengetahui,  
  
**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
  
**H.M. RIZAL EFFENDI, S.E.**

Balikpapan, 27 Januari 2014

**Plt.INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,**

  
**Hj. DAHNIAR, S.E.,M.AP.**  
**NIP. 19631111 198511 2 003**

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2014**



**INSPEKTORAT  
KOTA BALIKPAPAN**



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014**

KOTA : BALIKPAPAN  
 INSTANSI : INSPEKTORAT

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Program dan Kegiatan	Anggaran		Realisasi (%)
						Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kapasitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	2 Orang	2 Orang	100	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b> 1. Pelatihan Pengembangan Profesi Terkait dengan Sistem Pengawasan 2. Pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	Rp 18,000,000	Rp 11,130,000	61.83
						Rp 96,796,700	Rp 90,625,849	93.62
Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan	Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan	60 Org	60 Org	75	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b> 1. Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP  <b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b> 1. Mengikuti Pelatihan pengembangan profesi terkait dengan sistem pengawasan 2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Rp 204,071,500	Rp 174,917,249	85.71
						Rp 1,804,229,640	Rp 1,798,272,590	99.67
						Rp 47,910,000	Rp 37,928,700	79.17
Meningkatnya Kesadaran Hukum atas Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD	Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus	17 Kasus	16 Kasus	105	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> 1. Penanganan/Pemeriksaan Kasus/Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan	Rp 61,200,000	Rp 43,600,000	71.24
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	90%	78%	87	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> 1. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan External dan Inte 2. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Tindak Lanjut Temuan Hasil 3. Konsolidasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> 1. Pendampingan pemeriksaan LKPD RI dan Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI	Rp 394,800,000	Rp 347,226,000	87.95
						Rp 88,043,100	Rp 53,426,750	60.68
						Rp 80,000,000	Rp 67,397,550	84.25
						Rp 48,500,000	Rp 38,106,750	78.57

	Jumlah Objek Pengawasan	160 Obyek Pengawasan	247 Obyek Pengawasan	154.38	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> 1 Pelaksanaan Pengawasana Reguler dan tujuan tertentu dan Kegiatan - Ke	Rp 1,170,410,000	Rp 811,070,000	69.30
	Presentase pelaporan LP2P	80%	77%	96	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> 1. Penelitian dan Penilaian LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bali 2. Desiminasi LP2P PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp 110,337,400 Rp 79,698,200	Rp 102,414,678 Rp 65,489,000	92.82 82.17
	Presentase pelaporan penerimaan gratifikasi	100%	100%	72.00	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> 1 Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kot	Rp 27,436,500	Rp 19,715,040	71.86
	Presentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI yang memadai	90%	90%	100	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b> 1 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013	Rp 117,250,000	Rp 81,055,056	69.13
	Presentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	28%	172	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> 1. Unit Layanan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (ULKPD)	Rp 62,400,000	Rp 58,050,000	93.03
	Presentase Pelaksanaan Sosialisai Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah	100%	100%	100	<b>PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI ASET PEMERINTAHAN DAERAH</b> 1 Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah	Rp 42,727,500	Rp 35,679,500	83.50
<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Masyarakat pada SKPD</b>	Presentase SKPD Yang Melaksanakan SPIP	11%	16%	145	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> 1. Sosialisasi/Workshop Control Self Assessment (CSA) dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) dan Diagnostic Assessment (DA)	Rp 65,570,100	Rp 51,240,600	78.15
	Presentase LAKIP SKPD yang dievaluasi	75%	96%	128	<b>PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN</b> 1 Evaluasi Kinerja Instansi Atas Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan	Rp 111,000,000	Rp 68,680,000	61.87

	Presentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	50%	90%	180	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
					1. Bimbingan Teknis Pendamping Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi	Rp 207,331,500	Rp 173,569,340	83.72
					2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp 139,775,000	Rp 115,800,042	82.85



Balikpapan, 2 Januari 2015  
INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,

*[Handwritten Signature]*  
Hj. DAHNIAR, S.E.,M.AP.  
NIP. 19631111 198511 2 003